

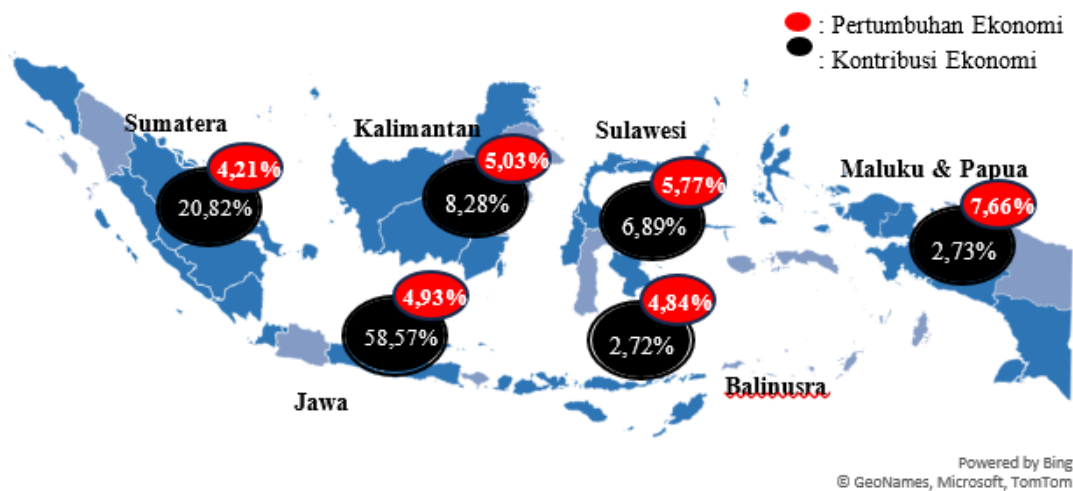
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan sosial merupakan persoalan krusial yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menggambarkan perbedaan kesejahteraan antar individu, tetapi juga menunjukkan adanya disparitas antarwilayah yang dapat menghambat pencapaian tujuan keadilan sosial. Fenomena ketimpangan ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebagai strategi untuk memperkecil kesenjangan sosial. Pada beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil pada kisaran 5%, namun capaian tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan ketimpangan secara menyeluruh.

Pulau Jawa, yang merupakan pusat utama kegiatan ekonomi nasional, memiliki peran penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Wilayah ini menyumbang lebih dari 58% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang menunjukkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Informasi terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pulau Jawa terhadap PDB nasional Indonesia dapat ditemukan dan dianalisis pada bagian yang akan disajikan berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Tahun 2024

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Pulau Jawa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93% serta memberikan kontribusi sebesar 58,57% terhadap PDB nasional, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Dominasi ekonomi Pulau Jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya tingkat infrastruktur yang lebih maju, konsentrasi industri manufaktur, serta keberadaan pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Sebagai destinasi utama bagi investasi domestik dan asing, Pulau Jawa terus memperkuat perannya dalam perekonomian nasional.

Namun, dominasi ekonomi tersebut juga mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Ketimpangan ini dapat dilihat dari kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terutama dalam hal distribusi investasi, akses terhadap teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Selain itu,

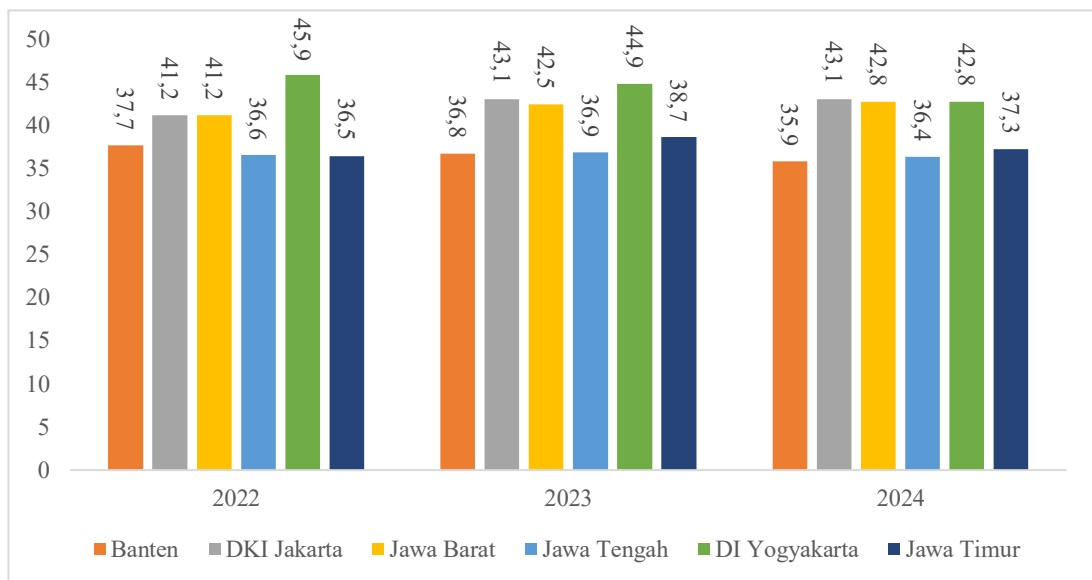
ketimpangan ekonomi juga terjadi di dalam Pulau Jawa itu sendiri. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat serta memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kondisi ini berkontribusi pada kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dalam satu pulau yang sama.

Salah satu penyebab utama yang mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan di wilayah Pulau Jawa adalah adanya ketidakseimbangan yang cukup signifikan dalam proses industrialisasi, di mana aktivitas industri lebih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja. Selain itu, ketimpangan ini juga diperparah oleh distribusi investasi yang tidak merata, sehingga menciptakan perbedaan mencolok dalam pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Pulau Jawa. Kawasan Jabodetabek berperan sebagai pusat kegiatan bisnis dan industri nasional, didukung oleh infrastruktur logistik yang sangat maju. Sebaliknya, daerah seperti Provinsi Jawa Tengah dan sebagian besar wilayah di Jawa Timur masih mengandalkan sektor pertanian serta industri rumah tangga berskala kecil. Ketidakseimbangan ini berkontribusi terhadap peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota besar, sementara wilayah pedesaan menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengembangan kapasitas ekonomi lokal.

Di sisi lain, tingginya jumlah penduduk yang menetap di suatu wilayah serta meningkatnya volume kendaraan di jalan yang menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di daerah metropolitan, khususnya Jakarta, menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Hal ini juga memperberat

beban infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan perkotaan yang mengalami tekanan populasi tinggi.

Selain perbedaan dalam struktur ekonomi, tingkat ketimpangan di Pulau Jawa juga dapat dianalisis melalui indikator gini ratio. Grafik pada bagian berikut menampilkan tren ketimpangan di Pulau Jawa selama periode 2022 hingga 2024, yang menggambarkan dinamika distribusi pendapatan serta tingkat disparitas antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Pulau Jawa Tahun 2022 – 2024

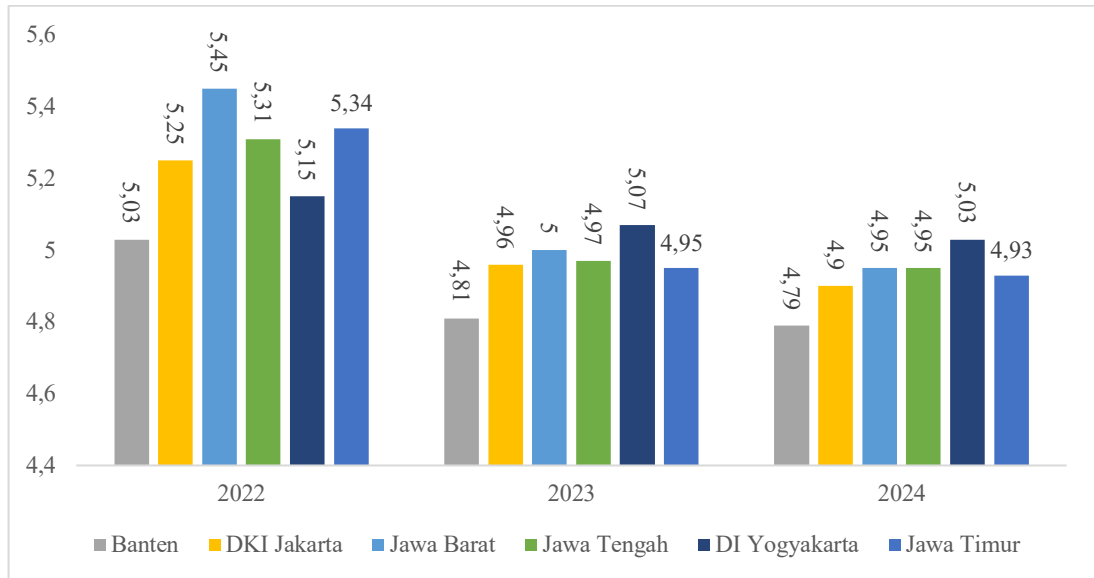
Data Gini Ratio periode 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa mengalami dinamika yang bervariasi. Pada tahun 2022, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan tingkat ketimpangan tertinggi dengan Gini Ratio sebesar 45,9, disusul oleh DKI Jakarta

dan Jawa Barat yang masing-masing berada pada angka 41,2. Sebaliknya, Provinsi Banten mencatatkan ketimpangan terendah dengan nilai Gini Ratio sebesar 37,7.

Memasuki tahun 2023, terlihat adanya penurunan tingkat ketimpangan di sejumlah provinsi, seperti DI Yogyakarta yang menurun menjadi 44,9 dan DKI Jakarta menjadi 43,1. Namun, peningkatan ketimpangan justru terjadi di Jawa Timur, dari 36,5 menjadi 38,7. Pada tahun 2024, tren penurunan lebih tampak, khususnya di DI Yogyakarta yang turun ke level 42,8 dan Banten menjadi 35,9, sementara provinsi lainnya menunjukkan kestabilan dalam distribusi pendapatan. Meski demikian, kesenjangan antarprovinsi masih cukup terasa, meskipun terdapat indikasi awal menuju proses konvergensi, terutama di wilayah dengan ketimpangan yang sebelumnya tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik dan terarah guna mempercepat pemerataan hasil pembangunan antarwilayah di Pulau Jawa..

Selama periode 2022 sampai 2024, ekonomi Pulau Jawa memperlihatkan pertumbuhan yang stabil dan tingkat pertumbuhan yang lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Seluruh provinsi di kawasan ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan sebagai motor penggerak utama. Provinsi DI Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024, mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi. Kestabilan ini menegaskan bahwa Pulau Jawa masih memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional, serta menunjukkan adanya arah positif dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi.

Visualisasi tren pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2022 – 2024

Perkembangan perekonomian pada provinsi di Pulau Jawa selama periode 2022-2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan kecenderungan ke arah konvergensi ekonomi regional. Pada tahun 2022, DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,45%, diikuti oleh Jawa Timur (5,34%) dan Jawa Barat (5,31%). Sementara itu, Banten dan DI Yogyakarta mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, masing-masing 5,03% dan 5,15%. Selisih pertumbuhan antarprovinsi mencapai 0,42%, yang menandakan masih adanya disparitas ekonomi antarwilayah.

Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi menurun di hampir seluruh provinsi, dengan rentang yang lebih sempit, yakni antara 4,81% (Banten)

hingga 5,07% (Jawa Timur). Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan disparitas, yang merupakan indikasi awal dari proses konvergensi. Tren ini berlanjut pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang semakin merata, berkisar antara 4,79% hingga 5,03%. Selisih pertumbuhan yang semakin kecil dari tahun ke tahun dari 0,42% pada 2022 menjadi 0,24% pada 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan pertumbuhan antarprovinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan secara bertahap. Meskipun variasi antarwilayah masih terlihat, arah konvergensi ekonomi terus berkembang secara progresif, mencerminkan inklusivitas yang kian menguat di kawasan tersebut.

Secara konseptual, teori konvergensi ekonomi yang dikemukakan oleh Barro dan Sala-i-Martin (1992) menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat pendapatan awal yang lebih rendah berpotensi untuk terus menurun dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju (β -convergence), sehingga dalam jangka panjang akan tercapai penurunan kesenjangan pendapatan antarwilayah (σ -convergence). Namun demikian, realitas empiris di Pulau Jawa menunjukkan bahwa proses konvergensi ini belum berjalan secara optimal. Masih terdapat perbedaan signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta disparitas kualitas pembangunan digital.

Dalam konteks ini, model pertumbuhan endogen yang diperkenalkan oleh Paul Romer (1986) memberikan landasan teoritis yang lebih kontekstual. Romer menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat dipengaruhi oleh peningkatan modal manusia, inovasi, dan teknologi. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong wilayah

tertinggal agar mampu mengejar ketertinggalannya, sekaligus mempercepat proses konvergensi antarwilayah.

Digitalisasi dalam penelitian ini diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), nilai transaksi e-commerce, dan nilai transaksi e-money. Ketiga indikator ini mencerminkan kesiapan dan tingkat pemanfaatan infrastruktur digital, aktivitas ekonomi berbasis teknologi, serta penetrasi sistem pembayaran digital. Provinsi dengan IP-TIK tinggi umumnya memiliki daya saing lebih besar dalam mengadopsi inovasi dan menarik investasi. Oleh karena itu, daerah yang masih memiliki skor IP-TIK rendah memerlukan prioritas dalam pengembangan infrastruktur digital dan penguatan literasi teknologi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengonfirmasi kontribusi positif digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Studi oleh Rafif Baihaqi dan Dewi Rahmi (2024) menunjukkan bahwa IP-TIK berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rezza Akmalya (2023) juga menemukan bahwa e-commerce berkontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian Alkis Amalia dan Rokhedi Priyo Santoso (2022) menggarisbawahi bahwa penggunaan e-money berdampak positif dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga aspek digitalisasi tersebut meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inklusi keuangan—semua berperan dalam mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah.

Meskipun telah banyak studi yang mengkaji pengaruh digitalisasi terhadap ekonomi, masih terbatas kajian yang secara simultan mengintegrasikan ketiga indikator digital tersebut dalam kaitannya dengan proses konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah, khususnya di Pulau Jawa. Kekosongan kajian ini menjadi relevan untuk diisi, mengingat pentingnya inklusi digital dalam strategi pembangunan regional yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan. Selain untuk mengisi celah teoritis, studi ini juga bertujuan memberikan dasar empiris yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis digital yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara menyeluruh sejauh mana digitalisasi berperan sebagai katalisator dalam mempercepat proses konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang lebih responsif terhadap tantangan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang sebelumnya, meskipun Pulau Jawa memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, realitas ketimpangan antarprovinsi masih tetap berlangsung. Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek pendapatan, tetapi juga dalam tingkat adopsi digitalisasi dan kesenjangan akses terhadap teknologi. Dalam konteks

pembangunan berbasis digital, perbedaan tersebut berpotensi memperlambat proses konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat konvergensi absolut dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah di Pulau Jawa selama periode 2018 – 2024?
2. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap konvergensi kondisional pertumbuhan ekonomi antar daerah di Pulau Jawa?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah dengan digitalisasi yang berbeda di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis adanya konvergensi absolut dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah di Pulau Jawa
2. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap konvergensi kondisional pertumbuhan antar daerah di Pulau Jawa
3. Melakukan uji beda tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah berdasarkan tingkat digitalisasi yang berbeda di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara teoritis maupun praktis dalam memahami peran digitalisasi terhadap proses konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Pulau Jawa. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini turut andil dalam pengembangan kajian ilmiah terkait hubungan antara digitalisasi dan konvergensi ekonomi, secara khusus di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan mengisi celah penelitian terdahulu yang belum banyak mengkaji keterkaitan ketiga indikator digitalisasi secara simultan, hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai upaya mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah melalui pemanfaatan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

Temuan ini dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi percepatan digitalisasi, terutama di wilayah dengan tingkat adopsi teknologi yang masih rendah. Kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berbasis data empiris untuk mendukung peningkatan pemanfaatan teknologi digital serta pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Pulau Jawa. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan ketimpangan ekonomi regional di era transformasi digital.